KEWAJIBAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ADANYA PELIMPAHAN PEMBAYARAN PENERANGAN JALAN UMUM
MELALUI ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS KABUPATEN PIDIE JAYA)
Bramanda Hariansyah, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anam, Syaiful. *Manajemen Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Badrulzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.

Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.

Elliott, Mark, dan Robert Thomas. *Public Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Bambang Trisantono, Soemantri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2011.

Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*.Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Bumi Aksa, 2007.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2012.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Khan, Amar. *Fundamentals of Public Budgeting and Finance*.Cham: Springer Nature, 2019.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**KEWAJIBAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ADANYA PELIMPAHAN PEMBAYARAN PENERANGAN JALAN UMUM
MELALUI ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS KABUPATEN PIDIE JAYA)**
Bramanda Hariansyah, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Konijnenbelt, Willem, dan H. D. van Wijk. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Deventer: Kluwer, 1985.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Muslimin, Ampah. *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni, 1980.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Pramono, Nindyo. *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata (Studi Kasus Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik Antara Pelanggan dan Perusahaan Listrik Negara)*. Yogyakarta: Genta Press, 2013.

Purbopranoto, Kontjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1978.

Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSSindo, 2008.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.

Setiawan, Yudhi. *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Stoner, A. F. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2000.

KEWAJIBAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ADANYA PELIMPAHAN PEMBAYARAN PENERANGAN JALAN UMUM
MELALUI ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS KABUPATEN PIDIE JAYA)
Bramanda Hariansyah, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Pustaka Tintamas, 1986.

Artikel Jurnal

Amaliatulwalidain. "Sistem Pemerintahan Desa dalam Tinjauan Sejarah Politik di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 2, no. 1 (Agustus 2017).

Kaffa, Silmi. "Keabsahan Perjanjian Alih Debitur Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Pihak Kreditur." *Indonesia Notary* 2.

Ramlan, Arshafa Nadhira. "*Analisis Implementasi Prinsip Money Follows Function Dalam Optimalisasi Penganggaran Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2025*," Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 13, No. 4, (2024).

Saleh, Hasrat Arif. "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Government* 1, no. 1 (2008).

Simanjuntak, Dewi Lestari. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dengan Pelanggan." *Premise Law Journal* (2013).

Wibawati, Siska Tri. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 30/ PDT.G.S/2018/PN.PWT)." *Soedirman Law Review* 1, no. 1 (2019).

Tesis dan Disertasi

Saputra, Darma. "Pertanggungjawaban Utang Tagihan Listrik Pelanggan terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan." Tesis Magister Hukum, Universitas Lampung, 2023.

Silvia. "Konsekuensi Hukum dari Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN sebagai Perusahaan Penyedia Pelayanan Kepentingan Umum (Studi Kasus di PT PLN Unit Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta Utara)." Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2006.

Syamsudin. "Perlindungan Hukum bagi Pelanggan Listrik Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) terhadap Pemadaman yang Dilakukan Secara Tiba-Tiba Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya." Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2003.

Artikel Koran / Internet

Firman. "Tagihan 4,3 Miliar Rupiah Belum Dibayar, PLN Padamkan Penerangan Jalan Umum di Pidie Jaya." *Beritakini.co.* Diakses 20 Januari 2025. https://beritakini.co/news/tagihan-rp-4-3-miliar-belum-dibayar-pln-padamkan-penerangan-jalan-umum-di-pidie-jaya/index.html

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KEWAJIBAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ADANYA PELIMPAHAN PEMBAYARAN PENERANGAN JALAN UMUM
MELALUI ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS KABUPATEN PIDIE JAYA)
Bramanda Hariansyah, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Retnowati, Esti. "Irjen Kemenkeu: Konsep 'Money Follow Program' dalam Penganggaran." https://www.djkn.kemenkeu.go.id/. Diakses 7 Februari 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. ke-37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**KEWAJIBAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ADANYA PELIMPAHAN PEMBAYARAN PENERANGAN JALAN UMUM
MELALUI ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS KABUPATEN PIDIE JAYA)**
Bramanda Hariansyah, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Perjanjian Kerja Sama Nomor 650/040/CABSGL/2009 dan Nomor 09/XII/2009.

Perjanjian Kerja Sama Nomor 0002.P/AGA.04.01/F07050000/2025 dan Nomor 100.3.7.1/5/2025.